



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025;





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-5001 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

29. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
Dan  
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2





Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.827.664.082.800 (satu triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp403.422.053.800 (empat ratus tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			




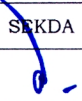
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp357.247.042.700 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.423.011.100 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta sebelas ribu seratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.752.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.353.799.062.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.353.799.062.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).





Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.805.728.699.556 (satu triliun delapan ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7





- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.472.022.894.443 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp826.755.857.780 (delapan ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp618.367.263.087 (enam ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.854.466.805 (lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.812.306.771 (lima belas miliar delapan ratus dua belas juta ribu tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.233.000.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp138.932.603.498 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.241.062.820 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.713.503.670 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.802.237.008 (lima puluh delapan miliar delapan ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.800.000 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp34.209.475.410 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp160.563.726.205 (seratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.822.223.203 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp741.503.002 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu dua rupiah).





Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp48.107.583.756 (empat puluh delapan miliar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12





- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp70.042.967.000 (tujuh puluh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.042.967.000 (tujuh puluh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp21.935.383.244 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.935.383.244 (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(48.107.583.756) (empat puluh delapan miliar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp48.107.583.756 (empat puluh delapan miliar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).





Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Gorontalo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang, Barang, yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang, Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Gorontalo ini.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Gubernur Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo,  
Pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR GORONTALO







RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo  
Pada tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 34

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			



**PROVINSI GORONTALO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>403.422.053.800,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	357.247.042.700,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	87.956.027.094,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	3.672.242.138,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	3.556.220.915,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	700.000,00
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	69.251.271,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	46.069.952,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	7.721.655.605,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	7.540.454.943,00
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	500.000,00
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	85.334.350,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	95.366.312,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	19.981.995.374,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	18.332.811.650,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	251.891.240,00
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	699.646.241,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	697.646.243,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	10.541.943,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1.483.442,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	6.243.645,00
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	1.507.426,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1.307.430,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	304.760.118,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	191.901.622,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	31.243.644,00
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	45.307.426,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	36.307.426,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	16.247.326.683,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	15.728.756.564,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	134.127.280,00
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	178.417.950,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	206.024.889,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	10.831.595.256,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	9.529.441.103,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	1.207.280.878,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	62.432.135,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	32.441.140,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	6.562.588.872,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	5.931.901.630,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	579.605.864,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	35.140.255,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	15.941.123,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	255.625.717,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	252.513.235,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	500.000,00
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.966.241,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	646.241,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	22.274.763.888,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	21.946.677.400,00
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	500.000,00
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	187.725.225,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	139.861.263,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	90.931.500,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	79.856.000,00
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	500.000,00
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	8.789.000,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1.786.500,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	2.000.000,00
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	500.000,00
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	500.000,00
4.1.01.01.14.0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	500.000,00
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	500.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	75.175.933.026,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	680.279.337,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	680.279.337,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	13.520.167.914,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	13.520.167.914,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	15.801.224.843,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	15.801.224.843,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	500.000,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	500.000,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	139.353.553,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	139.353.553,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	10.073.879.223,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	10.073.879.223,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	7.844.968.795,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	7.844.968.795,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.012.813.299,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.012.813.299,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	331.574.180,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	331.574.180,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	21.293.171.882,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	21.293.171.882,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	477.500.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	477.500.000,00
4.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00
4.1.01.02.14.0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	91.000.000.000,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	0,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	0,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	0,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	0,00
4.1.01.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	0,00
4.1.01.03.03.0001	PBBKB Bahan Bakar Gas	0,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	91.000.000.000,00
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	91.000.000.000,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	300.000.000,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	300.000.000,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	300.000.000,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	101.235.082.580,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	101.235.082.580,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	101.235.082.580,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	80.000.000,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	80.000.000,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	80.000.000,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.500.000.000,00
4.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	35.423.011.100,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	33.648.011.100,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.648.011.100,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	33.048.011.100,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	600.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.775.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	550.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	500.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	300.000.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	300.000.000,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	500.000.000,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	500.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	125.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	125.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.000.000.000,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.000.000.000,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.752.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	50.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	50.000.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	50.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	50.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	50.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	250.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	250.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	750.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	750.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.000.000.000,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	10.000.000,00
4.1.04.12.01.0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	500.000,00
4.1.04.12.01.0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	5.000.000,00
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	4.500.000,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	50.000.000,00
4.1.04.12.01.0020	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	10.000.000,00
4.1.04.12.01.0021	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	500.000,00
4.1.04.12.01.0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	5.000.000,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	150.000.000,00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	50.000.000,00
4.1.04.12.01.0025	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	25.000.000,00
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	35.000.000,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	20.000.000,00
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	10.000.000,00
4.1.04.12.01.0029	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	10.000.000,00
4.1.04.12.01.0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	10.000.000,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	20.000.000,00
4.1.04.12.01.0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	10.000.000,00
4.1.04.12.01.0033	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	10.000.000,00
4.1.04.12.01.0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	10.000.000,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	75.000.000,00
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	25.000.000,00
4.1.04.12.01.0037	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	25.000.000,00
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	25.000.000,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	40.000.000,00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	35.000.000,00
4.1.04.12.01.0041	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	25.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.01.0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	25.000.000,00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	7.500.000,00
4.1.04.12.01.0045	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	7.000.000,00
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	7.500.000,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.000.000,00
4.1.04.12.01.0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	1.000.000,00
4.1.04.12.01.0049	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.000.000,00
4.1.04.12.01.0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.000.000,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	175.000.000,00
4.1.04.12.01.0052	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	25.000.000,00
4.1.04.12.01.0053	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	25.000.000,00
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	25.000.000,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	500.000,00
4.1.04.12.01.0056	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	500.000,00
4.1.04.12.01.0057	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	500.000,00
4.1.04.12.01.0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	500.000,00
4.1.04.12.01.0067	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	150.000,00
4.1.04.12.01.0068	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	150.000,00
4.1.04.12.01.0069	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	100.000,00
4.1.04.12.01.0070	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	100.000,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	500.000.000,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.000.000,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	15.000.000,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	224.000.000,00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	5.000.000,00
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	5.000.000,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	10.000.000,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	10.000.000,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.000.000,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	500.000,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	200.000.000,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	10.000.000,00
4.1.04.12.02.0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	500.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00
4.1.04.13.01.0019	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000,00
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	1.000.000,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00
4.1.04.15.04.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00
4.1.04.15.04.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	550.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	100.000.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	69.000.000,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	100.000.000,00
4.1.04.15.08.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	25.000.000,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.500.000,00
4.1.04.15.08.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.000.000,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	2.500.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.353.799.062.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.353.799.062.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.703.030.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	6.703.030.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	6.703.030.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	32.433.889.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	20.293.122.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.867.619.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.616.336.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDPN	808.597.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	570.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	10.618.686.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.945.993.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	562.531.000,00
4.2.01.07.02.0008	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	8.110.162.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.522.081.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.522.081.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.031.935.398.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	869.726.743.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	869.726.743.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	162.208.655.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1.463.577.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	105.828.566.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.188.330.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	28.728.182.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	282.726.745.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	70.212.890.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.196.395.000,00
4.2.01.09.01.0070	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA	705.200.000,00
4.2.01.09.01.0071	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMK	3.742.951.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	11.657.636.000,00
4.2.01.09.01.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	21.410.707.000,00
4.2.01.09.01.0091	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	27.500.001.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	212.513.855.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	77.482.510.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.242.000.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	124.261.202.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	801.533.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	388.089.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.717.562.000,00
4.2.01.09.02.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.094.215.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200.000.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0032	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	2.821.054.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>400.000.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	400.000.000,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	400.000.000,00
4.3.03.01.02.0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN	400.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.757.621.115.800,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.472.022.894.443,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	826.755.857.780,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	477.099.007.444,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	353.540.235.973,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	292.940.837.286,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	60.599.398.687,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	35.178.525.053,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.290.948.307,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.887.576.746,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.694.265.957,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.694.265.957,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.170.660.191,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.281.820.427,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.888.839.764,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.462.049.886,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.462.049.886,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.008.113.292,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.948.448.787,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.059.664.505,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	762.516.342,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	760.516.342,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.670.111,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.735.181,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.934.930,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	27.795.617.982,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	22.254.612.614,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	5.541.005.368,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	840.088.164,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	720.088.164,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	120.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.520.264.493,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.162.264.493,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	358.000.000,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	100.000.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	100.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	322.153.971.225,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.955.656.528,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.955.656.528,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.247.950.989,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.247.950.989,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	75.187.120,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	75.187.120,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	131.953.269.088,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	116.215.174.488,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	15.738.094.600,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.921.907.500,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	5.142.271.941,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.462.361.686,00
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.069.742.106,00
5.1.01.02.06.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	6.707.767,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	124.261.202.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	388.089.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	801.533.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.790.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.714.652.192,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	200.298.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	200.298.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.512.920,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.512.920,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	197.577.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	197.577.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.215.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	300.243.412,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	300.243.412,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	53.500.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	53.500.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.760.545.860,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	153.979.980,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.629.340,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.536.540,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.598.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.380.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.380.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	336.626.919,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	141.207.282,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	141.207.282,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.863.994,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.863.994,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	163.615.732,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	163.615.732,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.688,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.688,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.698.379,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.698.379,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	173.435,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	173.435,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.587.481,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	12.587.481,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	181.464,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.464,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.367.263.087,00
5.1.02.01	Belanja Barang	105.186.893.392,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	104.870.007.466,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.473.897.900,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	952.508.320,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.309.824.566,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	62.146.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.645.893.568,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	87.820.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	87.896.885,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	507.617.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.150.526.943,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	512.187.500,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	830.349.217,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.900.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	251.375.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.179.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	77.643.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.465.666.207,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.970.226.069,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.907.102.867,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	801.824.200,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	32.148.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.199.140.117,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	628.505.318,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	867.533.820,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	191.882.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	18.052.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.681.762.474,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	752.935.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.517.551.150,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	632.458.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.916.420.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.268.151.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.059.299.000,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	46.800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.499.225.253,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.962.365.992,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.262.750.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.002.434.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.906.989.100,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	247.200.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	310.050.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	12.720.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.200.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	534.850.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	216.650.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	72.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	9.500.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	480.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	750.750.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	481.100.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	160.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	18.631.000,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	1.530.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.789.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	3.312.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	298.254.926,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	298.254.926,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	233.653.610.117,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.842.722.845,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.631.081.970,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.070.750.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	479.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	296.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	320.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	642.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	20.520.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.079.735.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	109.854.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.716.970.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.345.800.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	465.600.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.759.670.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4.547.416.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	70.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.851.427.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.374.570.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.434.700.656,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.517.550.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.285.187.500,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.386.686.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	76.472.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	289.448.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	57.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	138.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	351.300.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	29.750.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	68.400.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	31.500.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	144.087.100,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	31.996.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	870.850.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	312.233.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	250.369.850,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	115.934.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	133.578.278,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.306.090.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	462.161.800,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.488.249.695,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	13.407.703.036,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	160.250.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.095.144.700,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	202.700.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	39.755.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.191.552.260,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	9.350.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.250.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	325.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	390.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.926.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.200.716.146,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	15.292.800.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	28.035.000.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.242.800.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	376.710.192,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	342.385.164,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	353.000.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.558.020.790,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	227.400.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	212.400.000,00
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	3.000.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	12.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.027.196.001,00
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	3.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.579.971.001,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.800.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.203.560.000,00
5.1.02.02.04.0056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	8.000.000.000,00
5.1.02.02.04.0062	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.863.815.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	14.250.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	35.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.400.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	2.300.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	47.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	95.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	47.550.000,00
5.1.02.02.04.0459	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	70.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.636.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	686.500.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	81.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	225.000.000,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	222.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	87.500.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	334.000.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	110.000.000,00
5.1.02.02.06.0021	Belanja Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	110.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	7.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.143.450.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	260.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	133.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.217.600.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	10.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	245.500.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	106.650.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	5.700.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	45.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	370.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	560.500.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	190.500.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	250.000.000,00
5.1.02.02.09.0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataaan	70.000.000,00
5.1.02.02.09.0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataaan	50.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	294.949.200,00
5.1.02.02.10.0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	75.235.800,00
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	23.643.000,00
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	196.070.400,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	216.100.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	103.600.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	97.500.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	15.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.238.975.925,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.208.975.925,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	148.100.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	90.300.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	57.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.417.042.332,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	199.802.000,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	149.802.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	50.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.692.238.300,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	240.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	300.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	187.000.000,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	27.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	85.950.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.896.710.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.976.680.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.470.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	579.630.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	17.500.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	525.600.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	678.437.600,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.000.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	57.000.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	44.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	540.940.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	168.840.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	43.880.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	12.600.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	100.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.062.571.317,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.873.205.843,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	500.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	35.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	197.754.000,00
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	500.000.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	306.611.474,00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	50.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.452.430.715,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	3.025.860.249,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.872.639.000,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	513.931.466,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	1.020.000.000,00
5.1.02.03.04.0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	5.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	127.711.579.946,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.641.802.446,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.760.549.900,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	912.142.546,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.918.900.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.210.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.069.777.500,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	1.069.777.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.373.185.300,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.781.785.300,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.116.200.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	311.805.300,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.352.280.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.591.400.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.591.400.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	80.724.510.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	80.724.510.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	77.482.510.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	3.242.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.300.442.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.300.442.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	40.300.442.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.854.466.805,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.854.466.805,00
5.1.03.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	5.854.466.805,00
5.1.03.03.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	5.854.466.805,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05	Belanja Hibah	15.812.306.771,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.200.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.550.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.550.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.650.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.650.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.430.261.922,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.895.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.895.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	600.261.922,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	600.261.922,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	535.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	535.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	400.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	400.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.182.044.849,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.182.044.849,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.182.044.849,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.233.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	20.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	20.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.938.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.430.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.430.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.508.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.508.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	275.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	275.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	275.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>138.932.603.498,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.241.062.820,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.114.419.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.261.980.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.261.980.000,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	50.078.000,00
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	50.078.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	802.361.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	734.291.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	68.070.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.399.075.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.399.075.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.952.793.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	371.242.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	47.040.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.028.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	135.431.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.218.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	4.218.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	131.213.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	7.770.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	23.443.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	100.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	243.943.500,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	243.943.500,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	50.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	184.817.500,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	9.126.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.204.586.940,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.496.110.500,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.451.110.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.073.559.440,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.022.574.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.225.126.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	28.413.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	780.446.440,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.634.917.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	882.350.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	133.290.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	345.758.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	26.000.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	71.075.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	176.444.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.205.173.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	856.053.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	235.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	334.053.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	169.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	117.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	349.120.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	203.200.000,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	145.920.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.685.296.980,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.464.596.980,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.000.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	422.819.925,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	6.006.710.156,00
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	1.032.066.899,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	220.700.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	220.700.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.700.145.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	349.445.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	49.445.000,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	300.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.350.700.000,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	700.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	600.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	750.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.874.740.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.157.371.500,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	333.242.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.931.772.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	892.357.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	717.369.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	513.330.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	53.755.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	150.284.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	21.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	21.000.000,00
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	21.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	241.155.800,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	241.155.800,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	241.155.800,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	25.560.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	25.560.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	25.560.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.390.536.100,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.390.536.100,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.390.536.100,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.713.503.670,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	39.063.503.670,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.063.503.670,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.849.700.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.947.339.020,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	83.250.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.479.700.250,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	240.000.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	10.495.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.252.014.400,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	1.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	166.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.250.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.250.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.950.000.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	300.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.802.237.008,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	26.529.038.950,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	13.971.559.950,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	10.324.301.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.181.205.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.466.053.950,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.557.479.000,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	12.557.479.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	32.098.198.058,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.196.395.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.196.395.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.953.775.093,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.953.775.093,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.058.495.865,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	208.495.865,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	850.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	19.889.532.100,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	42.508.100,00
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	19.006.624.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	840.400.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	175.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	175.000.000,00
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	175.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.800.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	175.800.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	175.800.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	175.800.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>34.209.475.410,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.209.475.410,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	34.209.475.410,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	34.209.475.410,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	34.209.475.410,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>160.563.726.205,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	159.822.223.203,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	159.822.223.203,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	125.436.684.630,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	125.436.684.630,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	34.385.538.573,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	34.385.538.573,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	741.503.002,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	741.503.002,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	741.503.002,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	741.503.002,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.805.728.699.556,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-48.107.583.756,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>70.042.967.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.042.967.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	60.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	15.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	5.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	45.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	20.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	25.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	10.042.967.000,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.042.967.000,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10.042.967.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.935.383.244,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.935.383.244,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	16.935.383.244,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	16.935.383.244,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>21.935.383.244,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>48.107.583.756,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. GUBERNUR GORONTALO  
  
 RUDY SALAHUDDIN

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
